**BAB 1**

 **PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

 Pada dewasa ini pemerintah dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin agar bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Akan tetapi pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi tidak sedikit yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut sehingga membuat masyarakat tidak puas. Maka dari itu dicanangkanlah konsep good governance. Good governance itu sendiri merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana setiap pengambilan keputusannya sebagian besar melibatkan peranan masyarakat.

Penerapan good governance di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada awal era reformasi, akan tetapi selama ini penerapannya belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya sebagai salah satu contohnya masih maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan pemerintah. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasa tidak percaya lagi akan kinerja pemerintah. Terlepas dari hal itu good governance juga diharapkan menjadi suatu konsep yang dapat memperbaiki citra pemerintah.

Salah satu wujud pelaksanaan good governance adalah dimana masyarakat diikut sertakan dalam pemilihan umum ( Pemilu ). Dikatakan pemilihan umum karena disitu masyarakat diperkenankan memilih wakil-wakil rakyat yang akan

 menyampaikan aspirasinya. Wakil-wakil rakyat itulah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

 DPRD mengakomodir masukan-masukan, saran dan pendapat dari masyarakat serta merealisasikannya sesuai dengan kondisi dan kultur masyarakat dengan tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar Bupati dalam memenuhi aspirasi yang disampaikan masyarakat serta mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Bupati sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, pihak Pemerintah Daerah benar-benar memenuhi aspirasi masyarakat.

 Pada setiap daerah di Indonesia mempunyai wakil-wakil rakyat daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). Dari sekian banyak daerah yang ada di Indonesia salah satunya ibu kota Jawa Barat adalah Kota Bandung. Dimana atas tuntutan pemekaran wilayah, maka Kota Bandung kini memiliki Kabupaten Bandung Barat. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa setiap daerah memiliki wakil-wakil rakyatnya maka Kabupaten Bandung Barat pun memiliki wakil-wakil rakyatnya yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat ( DPRD – KBB ).

 DPRD Kabupaten Bandung Barat memiliki visi *“ Terwujudnya Lembaga Legislatif yang aspiratif, transparan dan partisipatif terhadap masyarakatnya”.* Dimana visi tersebut sejalan dengan prinsip good governance, akan tetapi pada pelaksanaanya tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menjadi pokok masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu para pegawai harus bekerja semaksimal mungkin agar visi maupun misi dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

 Kinerja pegawai yang dihasilkan haruslah selalu berdaya guna dan berhasil guna agar suatu pekerjaan yang dilakukan tidak terbuang sia-sia. Kinerja pegawai akan dikatakan berhasil apabila pegawai selalu memegang tanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dikerjakan, dalam hal ini pegawai juga semestinya dapat memegang kepercayaan masyarakat selaku stakeholder.

 Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari manusia sebagai tolak ukur utama, maka dari itu di suatu instansi dibutuhkan sosok yang profesional yang mampu menghadapi tantangan masa depan serta keinginan masyarakat yang akan datang.

 Kinerja tidak dapat berdiri sendiri melainkan banyak faktor yang mempengaruhi baik dalam hal pegawainya, pekerjaan yang dilakukan pegawainya maupun situasi yang menunjang atas pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan sinegritas antara semua unsur agar terciptanya kinerja pegawai yang berdaya guna dan berhasil guna.

 Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat, ditemukan bahwa kinerja pegawai masih rendah. Hal ini terlihat dari indikator, yaitu :

1. Kualitas kerja hal ini terkait dengan potensi pegawai dan fasilitas pegawai. Potensi pegawai sudah terlihat baik dalam setiap pekerjaannya akan tetapi fasilitas yang pegawai butuhkan terlihat kurang memadai. Contohnya : keadaan ruangan kantor yang terlihat meja satu dengan yang lain saling berdekatan dan sedikit tidak enak dipandang.
2. Ketepatan waktu yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai belum berjalan dengan baik. Contohnya : masih banyak pegawai yang tidak datang tepat waktu, dan kantor pun tak jarang terlihat sepi pegawai bebas keluar masuk dengan berbagai alasan yang ada.
3. Komunikasi yang terjalin antara pegawai dengan pimpinan dan instansi dengan masyarakat belum berjalan dengan baik. Contohnya : masih rendahnya pimpinan dalam hal memberikan motivasi kerja pada pegawai, hal ini dikarenakan pimpinan tidak selalu berada dikantor. Dan masih rendahnya informasi kepada masyakarat atas kinerja yang dilakukan oleh instansi tersebut.

 Permasalahan di atas diduga disebabkan oleh penerapan good governance dari pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja pegawai yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator good governance sebagai berikut :

1. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Dalam hal ini transparansi pegawai sebagai pembuat keputusan harus secara terbuka memberikan informasi terkait dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai apa sudah memenuhi masyarakat atau tidak. Contohnya : Para pembuat keputusan belum dapat menjelaskan kepada masyarakat luas tentang kinerja apa saja yang telah diraih untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

1. Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan yang dilakukan sudah seharusnya benar-benar menghasilkan kebutuhan berdasarkan pada sumber-sumber yang ada. Akan tetapi yang terlihat dilapangan belum sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Contohnya : Minimnya ruangan di DPRD mengharuskan pihak instansi melaksanakan kegiatan diluar kantor yang dapat memakan biaya.

1. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat dituntut untuk dapat berpikir secara luas dan berpikir ke depan sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi perkembangan jaman agar dapat mengimbangi instansi tersebut. Akan tetapi yang terlihat pemimpin dan masyarakat belum bisa diajak duduk bersama untuk membicarakan tantangan tersebut, masyarakat hanya bisa menunggu kebijakan saja tanpa diikut sertakan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

 Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul ***“Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.”***

* 1. **Rumusan Masalah**
1. Seberapa besar pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan good governance diukur melalui partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
3. Seberapa besar pengaruh partisipasi terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
4. Seberapa besar pengaruh aturan hukum terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
5. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
6. Seberapa besar pengaruh daya tanggap terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
7. Seberapa besar pengaruh berorientasi konsensus terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
8. Seberapa besar pengaruh berkeadilan terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
9. Seberapa besar pengaruh efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
10. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
11. Seberapa besar pengaruh visi strategis terhadap kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat ?
12. Apa saja Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengaruh penerapan good governance dalam menciptakan kinerja pegawai yang optimal ?
	1. **Tujuan Penelitian**
13. Mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Good Governance terhadap kinerja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.
14. Mengetahui besarnya pengaruh penerapan good governance diukur melalui partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.
15. Mengembangkan faktor-faktor yang menjadi hambatan pengaruh Penerapan Good Governance terhadap kinerja Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.
	1. **Manfaat Penelitian**
16. Secara Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi negara yang terkait dengan Pengaruh Penerapan Good Governance dalam memaksimalkan Kinerja Pegawai di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.

1. Secara Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan bagi DPRD Kabupaten Bandung Barat khususnya terkait dengan Pengaruh Penerapan Good Governance dalam memaksimalkan Kinerja Pegawai di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

 Bertitik tolak dari latar belakang serta perumusan masalah, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang dapat dijadikan landasan teori, dalil dan pendapat dari para pakar berhubungan dengan variabel yang mengkaji kajian dalam melaksanakan penelitian, yakni : Good Governance ( Variabel Bebas ) dan Kinerja ( Variabel Terikat ).

 Berikut ini peneliti akan mengemukakan pengertian dikemukakan oleh **Kooiman** dalam **Sedarmayanti** **(2012:35)** bahwa :

 **“ Governance lebih merupakan serangkaian proses sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut ”.**

 Berikutnya, **UNDP** dalam **Sedarmayanti (2012:44)** mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangakan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi :

1. **Partisipasi (Participation)**

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

1. **Aturan Hukum (Rule of Law)**

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.

1. **Transparansi (Tranparency)**

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi

1. **Daya tanggap (Responsiveness)**

Setiap instusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).

1. **Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)**

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

1. **Berkeadilan (Equlity)**

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

1. **Efektivitas dan Efisiensi (Effetiveness and Efficiency)**

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

1. **Akuntabilitas (Accountability)**

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

1. **Visi Strategis (Strategic Vision)**

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

 Dari definisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa good governance merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dimana masyarakat dilibatkan dalam membuat kebijakan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sejumlah prinsip yang telah ada sudah seharusnya dijadikan pedoman dalam membangun suatu pemerintahan.

 Selanjutnya peneliti juga akan mengemukakan pengertian Kinerja menurut **Prawirosentono** dalam **Sinambela (2012:5)** mengemukakan kinerja sebagai berikut :

 “**Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.**

 Aspek-aspek yang meliputi kinerja dan dapat dijadikan ukuran kinerja seseorang menurut **T.R. Mitchell** yang di kutip dalam **Sedarmayanti (2009:51)** yaitu:

1. **Kualitas kerja (Quality of work)**

Yaitu melaksanakan suatu kegiatan dengan cara yang ideal/sesuai atau menyelesaikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1. **Ketepatan Waktu (Promptness)**

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

1. **Inisiatif (Initiative)**

Salah satu tindakan yang sehat dan tepat yang dilakukan untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata atas dasar pemikiran sendiri.

1. **Kemampuan (Capability)**

Menguasai keahlian untuk melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan secara efektif agar tujuan tercapai

1. **Komunikasi (Communication)**

Proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain atantara pimpinan dengan pegawai, pegawai dengan pegawai, dimaksud agar dapat diterima dan dimengerti antar sesama

 Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang telah dilakukan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

* 1. **Hipotesis**

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut hipotesis penelitian yang peneliti ajukan, yaitu :

1. **Hipotesis Utama**

“Terdapat pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat”.

1. **Sub Hipotesis**
2. Terdapat pengaruh partisipasi terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
3. Terdapat pengaruh aturan hukum terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
4. Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
5. Terdapat pengaruh daya tanggap terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
6. Terdapat pengaruh berorientasi konsensus terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
7. Terdapat pengaruh berkeadilan terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
8. Terdapat pengaruh efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
9. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat
10. Terdapat pengaruh visi strategis terhadap kinerja pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Berikut peneliti Gambarkan Paradigma Pemikiran seperti di bawah ini :

**Gambar 1.1**

**Paradigma Pengaruh**

Keterangan :

X = Variabel Good Governance

Y = Variabel Kinerja Pegawai

 = Pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian

 Berdasarkan hipotesis utama diatas maka peneliti mengemukakan definisi oprasional adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh yaitu menunjukan seberapa besar keterkaitan atau pengaruh antara Penerapan Good Governance terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.
2. Good Governance (X) adalah suatu tata kelola pemerintahan yang baik dimana masyarakat dilibatkan yang berdasarkan pada prinsip good governance yaitu : (partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efsiensi, akuntabilitas, visi strategis) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.
3. Kinerja Pegawai (Y) adalah adalah hasil kerja yang telah dilakukan pegawai sesuai dengan peraturan yang berpedoman pada indikator kinerja yaitu : (kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, komunikasi) sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hipotesis diatas adalah hipotesis penelitian yang sifatnya verbal dan subtantif artinya belum bisa di uji oleh karena itu harus diterjemahkan kedalam hipotesis statitik yang sudah operasional sebagi berikut :

* 1. **Hipotesis Utama**

Ho :$ρs=0$, artinya tidak ada pengaruh Penerapan Good Governance (X) dengan Kinerja Pegawai (Y)

Hi :$ρs\ne 0$, artinya ada pengaruh Penerapan Good Governance (X) dengan

Kinerja Pegawai (Y)

 Berdasarkan hipotesis utama diatas, maka terdapat sub hipotesis sebagai berikut :

* 1. **Sub Hipotesis**
		1. Ho : ρx1y = 0, tidak ada pengaruh Partisipasi (X1) terhadap kinerja pegawai

(Y)

Hi : ρx1y*≠*0, terdapat pengaruh Partisipasi (X1) terhadap kinerja pegawai (Y)

* + 1. Ho : ρx2y = 0, tidak ada pengaruh Aturan Hukum (X2) terhadap kinerja

pegawai (Y)

Hi : ρx2y*≠*0, terdapat pengaruh Aturan Hukum (X2) terhadap kinerja pegawai

(Y)

* + 1. Ho : ρx3y = 0, tidak ada pengaruh Transparansi (X3) terhadap kinerja pegawai

(Y)

Hi : ρx3y *≠* 0, terdapat pengaruh Transparansi (X3) terhadap kinerja pegawai (Y)

* + 1. Ho : ρx4y = 0, tidak ada pengaruh Daya Tanggap (X4) terhadap kinerja

pegawai (Y)

Hi : ρx4y *≠* 0, terdapat pengaruh Daya Tanggap (X4) terhadap kinerja pegawai (Y)

* + 1. Ho : ρx5y = 0, tidak ada pengaruh Berorientasi Konsensus (X5) terhadap

kinerja pegawai (Y)

Hi : ρx5y *≠* 0, terdapat pengaruh Berorientasi Konsensus (X5) terhadap kinerja pegawai (Y)

* + 1. Ho : ρx6y = 0, tidak ada pengaruh Berkeadilan (X6) terhadap kinerja pegawai

(Y)

Hi : ρx6y *≠* 0, terdapat pengaruh Berkeadilan (X6) terhadap kinerja pegawai (Y)

* + 1. Ho : ρx7y = 0, tidak ada pengaruh Efektivitas dan Efisensi (X7) terhadap

kinerja pegawai (Y)

Hi : ρx7y *≠* 0, terdapat pengaruh Efektivitas dan Efisensi (X7) terhadap kinerja pegawai (Y)

* + 1. Ho : ρx8y = 0, tidak ada pengaruh Akuntabilitas (X8) terhadap kinerja

pegawai (Y)

Hi : ρx8y *≠* 0, terdapat pengaruh Akuntabilitas (X8) terhadap kinerja pegawai (Y)

* + 1. Ho : ρx9y = 0, tidak ada pengaruh Visi Strategis (X9) terhadap kinerja

pegawai (Y)

Hi : ρx9y *≠* 0, terdapat pengaruh Visi Strategis (X9) terhadap kinerja pegawai (Y)



**Gambar 1.2**

**Diagram Jalur Pengaruh X1X2X3X4X5X6X7X8X9 terhadap Y**

**Keterangan:**

X1 = Faktor Partisipasi

X2 = Faktor Aturan Hukum

X3  = Faktor Transparansi

X4 = Faktor Daya Tanggap

X5 = Faktor Berorientasi Konsensus

X6 = Faktor Berkeadilan

X7 = Faktor Efektivitas dan Efisiensi

X8 = Faktor Akuntabilitas

X9 = Faktor Visi Strategis

Y = Aspek Kinerja Pegawai

Pyx = Pengaruh Variabel Penerapan Good Governance terhadap Variabel Kinerja Pegawai

ε= Epsilon

 Berdasarkan sub hipotesis diatas maka peneliti peneliti mengemukakan definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. **Partisipasi (Participation)**

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.

1. **Aturan Hukum (Rule of Law)**

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.

1. **Transparansi (Tranparency)**

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat

1. **Daya tanggap (Responsiveness)**

Setiap instusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.

1. **Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)**

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.

1. **Berkeadilan (Equlity)**

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya terutama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.

1. **Efektivitas dan Efisiensi (Effetiveness and Efficiency)**

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-naiknya berbagai sumber yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat.

1. **Akuntabilitas (Accountability)**

Para pengambil keputusan dalam pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

1. **Visi Strategis (Strategic Vision)**

Para pemimpin yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.